

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama yang ingin diraih oleh tiap-tiap negara di dunia. Upaya ini bertujuan sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing nasional. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tidak sebatas pada peningkatan produk domestik bruto (PDB), melainkan juga pada kapasitas suatu negara dalam menghadirkan distribusi kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh kalangan masyarakat (Todaro & Smith, 2020a). Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi dunia, negara-negara dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal guna mencapai pertumbuhan yang inklusif (UNDP, 2022).

Meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan, realitas di berbagai negara menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan tersebut tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan dapat memicu kesenjangan sosial, menurunkan kohesi sosial, serta menimbulkan potensi konflik (World Bank 2023). Oleh karena itu, pemerataan distribusi pendapatan menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bersama (Hababil et al., 2024). Isu ini semakin relevan di era modern ketika mobilitas modal, teknologi, dan tenaga kerja bergerak cepat, namun akses dan peluang ekonomi tidak selalu terbuka bagi semua pihak (OECD, 2021)

Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Isu ini mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam proses distribusi pendapatan nasional, dimana Sebagian besar pendapatan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Ketimpangan yang tinggi bisa memunculkan hambatan terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Anderson, 2019). Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan pendapatan terjadi ketika 20% penduduk terkaya memperoleh proporsi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 40% kelompok penduduk termiskin (Todaro & Smith, 2020b).

Kondisi ketimpangan pendapatan yang tinggi di suatu daerah menunjukkan bahwa hasil dari pembangunan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga tidak dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin (Baldwin, 1986). Ketimpangan pendapatan yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan, terutama di negara-negara berpendapatan menengah (Todaro & Smith, 2020b). Dengan melihat bagaimana dampaknya, maka ketimpangan pendapatan telah ditetapkan oleh *World Economic Forum* sebagai risiko global yang harus diwaspadai (Forum, 2023).

Negara-negara berkembang secara umum cenderung lebih rentan terhadap dampak ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, serta lemahnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan (United Nations Development Programme, 2022). Ketimpangan yang tinggi di negara-negara

berkembang dapat memperburuk ketidakstabilan sosial, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat proses pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Todaro, 2015).

Oleh karena itu, isu ketimpangan menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan global. Hal ini tercermin dalam *goal* Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yakni tujuan ke-10 yang menargetkan pengurangan ketimpangan di dalam dan antarnegara (*reducing inequality within and among countries*) (United Nation, 2015).

Salah satu prioritas utama dalam SDGs 10 adalah mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menjamin bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah serta kelompok yang rentan (Innovillage, 2022). Dengan demikian, ketimpangan pendapatan tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Candrawati & Nugroho, 2022).

Diperlukan sebuah tolok ukur untuk melihat adanya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Dalam mengukur derajat ketimpangan pendapatan, salah satu indikator yang paling luas digunakan di tingkat internasional adalah Indeks Gini (Todaro, 2015). Indeks ini menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah menyimpang dari distribusi yang merata (Todaro & Smith, 2020b). Nilai Gini berkisar antara 0-1 (atau 0 hingga 100 jika dalam persen), di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa ada

ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu (Haddad et al., 2024).

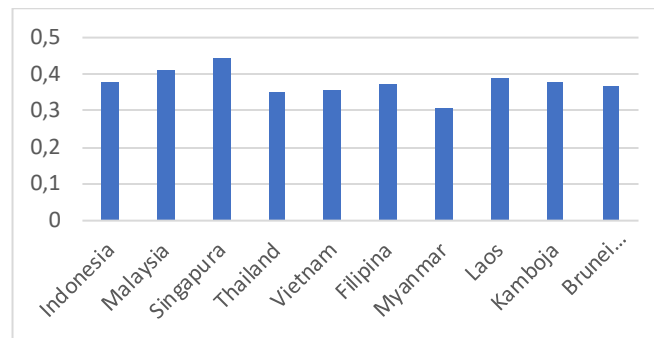
Menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pendapatan masuk pada kategori rendah jika Gini Ratio $< 0,4$, sedang jika berada di antara $0,4-0,5$, dan tinggi jika $> 0,5$ (Badan Pusat Statistik, 2020). Sementara itu, secara internasional, World Bank juga menggunakan klasifikasi serupa, di mana nilai Gini antara $0,25-0,35$ dianggap relatif merata, $0,35-0,45$ menunjukkan ketimpangan sedang, dan di atas $0,45$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi (World Bank, 2023b).

Ketimpangan pendapatan juga merupakan tantangan signifikan di kawasan Asia. Meskipun beberapa negara di Asia punya pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam dua dekade terakhir, distribusi pendapatan masih belum merata (Javier, 2024). Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali belum diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata.

Fenomena ketimpangan ini terjadi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga mengakar kuat di negara-negara berkembang yang tengah mengalami transformasi ekonomi signifikan. Ketimpangan pendapatan ini tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang bisa memperburuk ketidakstabilan politik dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.1 menyajikan grafik perbandingan nilai Indeks Gini di beberapa negara berkembang di Asia yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang meluas dan tidak hanya terbatas pada negara tertentu.

Gambar 1.1 Grafik Indeks Gini Rasio ASEAN

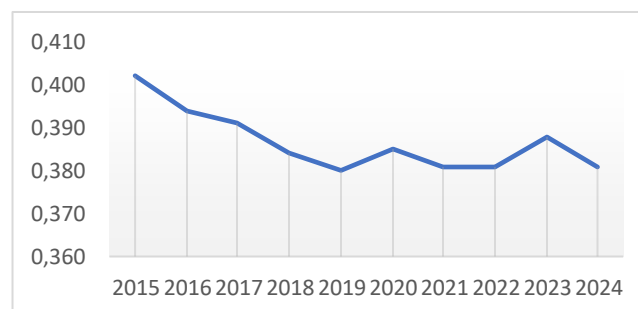


(Sumber: Data World Bank 2021, diolah)

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga dihadapkan dengan ketimpangan pendapatan yang menjadi tantangan struktural dalam jangka panjang. Meskipun data menunjukkan bahwa tren ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat ketimpangan tersebut masih berada pada kategori sedang menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan sehingga jurang (*gap*) kesenjangan antar kelompok masyarakat tetap lebar karena distribusi pendapatan yang tidak merata masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif di Indonesia (Aryunah, 2015).

Gambar 1.2 Indeks Rasio Gini Indonesia

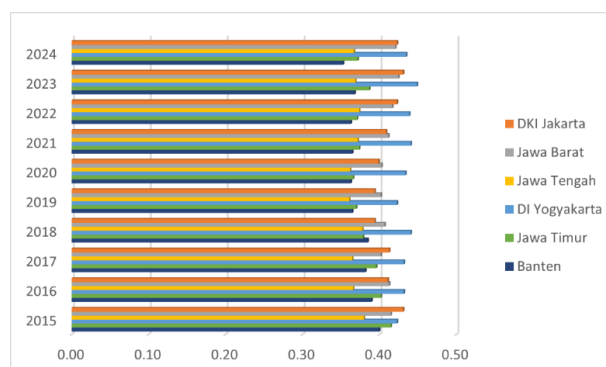


(Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah)

Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa Rasio Gini Indonesia sempat mencapai angka tertinggi sebesar 0,414 pada tahun 2015 dan terus berada pada kisaran 0,38 hingga tahun 2024. Angka ini menjelaskan apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan semakin tampak dalam perbedaan akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan lapangan pekerjaan antara kelompok penduduk kaya dan miskin, serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Ananian & Giulia, 2024).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya terjadi di level nasional dan antarindividu, tetapi juga tercermin dalam kesenjangan di masing-masing daerah. Beberapa wilayah menunjukkan tingkat ketimpangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, meskipun berada dalam satu sistem ekonomi nasional yang sama. Ketimpangan regional ini menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan sosial antarwilayah. Selain itu, fenomena ini juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan, terdapat wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat namun disertai peningkatan ketimpangan.

Gambar 1.3 Perbandingan Indeks Gini di Pulau Jawa



(Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah)

Salah satu wilayah di Indonesia yang menunjukkan fenomena tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam satu dekade terakhir, provinsi ini konsisten mencatatkan Rasio Gini tertinggi secara nasional. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 hingga 2023, Rasio Gini DIY secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, bahkan sempat ada di angka 0,446 pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di DIY cenderung timpang, di mana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Tingginya Rasio Gini ini mencerminkan bahwa upaya pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai di wilayah ini (Ingli Intan Hadju, 2021).

Di sisi lain, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di Pulau Jawa, di mana sektor jasa seperti pendidikan dan pariwisata menjadi pilar penting dalam struktur ekonominya, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kontribusi signifikan terhadap ekonomi regional (Harian Jogja, 2025). Namun, pertumbuhan ekonomi ini belum mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan. Fenomena ini mencerminkan adanya paradoks pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Meskipun secara makroekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan kestabilan dan pertumbuhan yang relatif baik, ketimpangan kesejahteraan antarpenduduk dalam wilayah kabupaten/kota masih menjadi

permasalahan yang signifikan. Terlihat dari nilai Indeks Gini yang cenderung tinggi di beberapa daerah, yang mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara individu dalam satu wilayah.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Indeks Gini di masing-masing kabupaten/kota di DIY selama lima tahun terakhir. Data ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya perlu dianalisis pada level provinsi secara agregat, tetapi juga perlu dikaji lebih mendalam di tingkat kabupaten/kota agar akar ketimpangannya dapat diidentifikasi secara spesifik.

Tabel 1.1 Indeks Ratio Gini di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulonprogo	0,379	0,367	0,380	0,402	0,373
Bantul	0,418	0,441	0,410	0,454	0,417
Gunungkidul	0,352	0,323	0,316	0,343	0,355
Sleman	0,420	0,425	0,418	0,433	0,431
Kota Yogyakarta	0,421	0,464	0,519	0,454	0,449

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa daerah seperti Kota Yogyakarta dan Sleman mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun distribusi pendapatan di dalam wilayah tersebut belum merata. Sementara itu, daerah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan.

Jika dilihat dari struktur PDRB, sektor tersier atau sektor jasa mendominasi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Sleman. Kedua wilayah ini memiliki konsentrasi aktivitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan perdagangan yang tinggi, sehingga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, dominasi sektor ini tidak selalu memberikan dampak pemerataan ke seluruh wilayah. Wilayah lain seperti

Gunungkidul dan Kulon Progo, yang perekonomiannya masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, sering kali mengalami ketertinggalan dalam hal pendapatan per kapita maupun akses terhadap layanan publik dan infrastruktur ekonomi. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan kontribusi antar sektor terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang pada akhirnya turut memengaruhi pola distribusi pendapatan antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketimpangan yang terjadi di DIY tidak hanya disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi antar wilayah, tetapi juga oleh hal lain seperti penyebaran investasi dan kualitas sumber daya manusia. Konsentrasi investasi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan, misalnya, berkontribusi besar terhadap disparitas ekonomi antar kabupaten/kota (Faranisa et al., 2025). Di sisi lain, rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi di wilayah dengan akses pendidikan yang baik turut mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan, sementara wilayah dengan capaian pendidikan rendah cenderung tertinggal secara ekonomi. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum dinikmati secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di DIY.

Pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak selalu identik dengan pemerataan (Violin, 2023). Di DIY, meskipun laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir, belum semua wilayah merasakan dampak yang sama. Kota Yogyakarta, misalnya, menikmati pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan wilayah lain karena peran dominannya dalam sektor jasa dan konsumsi. Sebaliknya, daerah seperti

Gunungkidul atau Kulon Progo masih tertinggal karena basis ekonominya yang lebih mengandalkan sektor primer. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif justru dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Investasi pun menjadi faktor krusial dalam percepatan pembangunan ekonomi. Namun, distribusi investasi di DIY cenderung terpusat di wilayah dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik, seperti Kota Yogyakarta dan Sleman. Wilayah-wilayah tersebut memiliki daya tarik lebih tinggi bagi investor karena didukung oleh fasilitas pendidikan, transportasi, serta pasar yang lebih luas. Sebaliknya, daerah yang lebih terpencil atau minim infrastruktur cenderung kurang mendapatkan perhatian dari sektor investasi. Ketimpangan distribusi investasi ini dapat memperkuat ketimpangan pendapatan karena hanya wilayah tertentu yang mendapatkan keuntungan dari arus modal masuk. Dengan kata lain, investasi yang tidak merata akan memperkuat ketimpangan ekonomi secara spasial (Deny Irawan, Baiq Saripta Wijimulawiani, 2024).

Pendidikan adalah kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong mobilitas ekonomi (Farhan & Sugianto, 2022). Rata-rata lama sekolah di DIY memang menunjukkan tren yang meningkat, namun disparitas antarwilayah masih nyata. Daerah dengan akses pendidikan yang lebih lengkap dan berkualitas, seperti Sleman atau Kota Yogyakarta yang cenderung memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, daerah dengan keterbatasan akses pendidikan seperti Gunungkidul memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah, yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah yang tidak merata dapat memperbesar ketimpangan, karena pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam mengakses peluang ekonomi.

Ketimpangan pendapatan yang masih bertahan di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, fenomena paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan ketimpangan pendapatan yang tetap tinggi menuntut kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut.

Penelitian ini menjadi penting mengingat karakteristik DIY yang unik dibandingkan daerah lain di Indonesia, dimana memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, peran kuat sektor pendidikan dan pariwisata, namun di saat yang sama mencatatkan tingkat ketimpangan yang paling tinggi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak inklusif tetap dapat terjadi bahkan dalam wilayah dengan kemajuan sosial ekonomi yang relatif baik.

Dengan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan di DIY, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika ketimpangan di tingkat regional. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan terarah, sekaligus mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan isu yang cukup krusial. Jika masalah ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan kesenjangan akan semakin meluas dan berpotensi menghambat jalannya pembangunan di provinsi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini meliputi variabel ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat (dependen) yang diukur melalui nilai rasio Gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, variabel bebas (independen) yang dianalisis mencakup laju pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut, tingkat investasi yang direpresentasikan oleh jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), serta rata-rata lama sekolah yang diukur dari jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas.

1.5 Manfaat

1. Untuk para pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian ketimpangan pendapatan dengan mengungkap secara empiris berbagai faktor yang mempengaruhi, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Bagi pengambil kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dan dapat dijadikan acuan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dalam mengambil kebijakan selanjutnya.